PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **KEMENTERIAN KEUANGAN**

UNIT KERJA : **DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUNARYO**
2. Jabatan : **KEPALA SUBDIREKTORAT TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR**
3. NHK : **125656**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 3.746.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 217 m2/67 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/68 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/187 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.155.000.000
4. Tanah Seluas 276 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 137.000.000
5. Tanah Seluas 274 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 137.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 317.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 175.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 68.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. LAINNYA, TERN VERGE SEPEDA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
4. MOBIL, NISSAN MARCH HATCHBACK Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

5. MOTOR, HONDA CBR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
6. MOTOR, HONDA C70 Tahun 1975, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**123.000.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**23.800.400**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**507.408.256**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**4.575.208.656**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**3.000.000**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**4.572.208.656**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.